

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMU	FORUM	21	25-8-2002

Saleh Djasit: "Mau Ditutup, Saya Setuju"

Saleh Djasit, Gubernur Riau, tak keberatan bila pemerintah pusat ingin mengatur penambangan pasir laut yang berada di wilayahnya. Di sisi lain, pensiunan TNI Angkatan Darat berbingtang satu itu, membantah keras kalau penolakannya terhadap aspirasi pembentukan Provinsi Kepulauan Riau karena ia tetap ingin mengendalikan bisnis pasir laut ke Singapura. Apa sebenarnya yang terjadi di Kepulauan Riau? Berikut kutipan wawancaranya dengan Mustopa dari FORUM, Jumat pekan lalu di Pekanbaru.

Kabarnya penolakan Anda terhadap aspirasi pembentukan Provinsi Kepulauan Riau karena Riau Daratan takut kehilangan pendapatan daerah dari bisnis pasir laut?

Yang mana itu. Berapa sih pasir yang dihasilkan? Provinsi paling banyak hanya menerima Rp 15 miliar per tahunnya dari penambangan pasir ini. Kecil sekali. Sedangkan APBD kita sekarang saja sudah mencapai Rp 1,7 triliun. Tidak sampai sepuluh persennya. Dan penambangan pasir pun hanya beberapa tahun. Paling hanya lima tahun izin pertambangan yang ada. Setelah itu mau jadi apa?

Jadi, bila saya dianggap menolak pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, sama sekali tidak ada hubungannya dengan soal pasir. Provinsi Riau baru saja dimekarkan. Riau yang dulunya ada tujuh daerah tingkat dua, kini sudah menjadi 16 daerah tingkat II. Lebih dua kali lipat. Yaitu sejak tahun 1999. Di Kabupaten Kepulauan Riau sendiri yang dulu hanya Kabupaten Kepulauan kini sudah menjadi lima daerah tingkat II. Saya melihat dari segi urgensinya belum layak menjadi provinsi. Itu salah satu alasan saya.

Soal pasir belakangan kan ramai lagi. Bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan kemungkinan saja bisa dihentikan penambangan pasir itu?

Ya, memang sekarang sedang ditangani oleh pusat. Bahkan kalau ditutup pun saya setuju. Dari pada sumber daya alam kita dieksploitasi habis-habisan, tapi tak ada manfaat



WAYUDI EL PANGGABEN

nya buat kita. Ini kan bisa merusak lingkungan. Tapi kalau mau diatur secara baik, aturlah. Kita mendukung pemerintah pusat kalau memang diatur benar-benar.

Sejauh ini Anda melihat ada penyimpangan-penyimpangan dari penambangan pasir ini?

Yang selama ini terjadi adalah mengambil banyak tapi melapor sedikit. Hal ini terjadi karena kita tidak punya sistem pengawasan yang baik. Kapal datang mengeruk senaknya. Kemudian, melapor satu yang diangkut 20. Tidak ada pengawasannya sama sekali.

Jadi, sebenarnya kalau diawasi benar-

benar pendapatannya tidak hanya Rp 15 miliar itu?

Besar sekali. Mungkin bisa sampai ratusan miliar. Tapi soal itu kan menjadi wewenangnya dari daerah. Sebab, aturannya kalau kawasannya yang ditambah itu berada di kawasan 0-4 mil sistem bagi hasilnya 75 persen untuk kabupaten dan 25 persen untuk provinsi. Sedangkan kalau penambangannya itu berada di kawasan 4-12 mil, maka 75 persen untuk provinsi dan 25 persen untuk kabupaten. Tapi, sekarang pemegang kuasa pertambangan itu sebagian besar berada di kawasan yang dimiliki oleh kabupaten, bukan yang dimiliki oleh provinsi. Jadi lebih banyak kabupaten yang dapat.

Baru-baru ini kan ada kapal yang ditangkap. Secara hukum siapa sih yang berhak memberikan sanksi hukum?

TNI Angkatan Laut sesuai dengan Keppres untuk penegakan hukum di laut koordinatonya TNI Angkatan Laut. Setelah melakukan penangkapan, tentu harus langsung diserahkan ke aparat penyidikan yang berwenang. Jadi prosedur hukumnya sudah ada.

Dan itu harus diikuti dan ditegakkan.

Ada tuntutan agar Singapura dituntut soal pasir laut ini?

Ini sebenarnya akumulasi kekecewaan dari masyarakat. Ya, yang terjadi selama ini kan seperti itu. Selama ini sumber daya alam kita masih belum bisa kita nikmati dengan baik. Kita tidak bisa mencegah kekecewaan masyarakat ini. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya. Ini kan masih sebatas wacana saja. Untuk aksinya oleh pemerintah sendiri kita masih belum ada niat sejauh itu. Tapi kalau wacana ini terus berkembang bisa saja tuntutan masyarakat tersebut bisa diwujudkan. □